



PT. BPR GUNA YATRA

# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Tahun 2023

🏠 JL KEBONROJO NO 8 , SURABAYA  
☎️ (031) 3520597

Telah disesuaikan dengan  
**SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020**



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN



BANK  
PERKREDITAN  
RAKYAT

## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

### B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Guna Yatra mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat

- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Guna Yatra beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

### **C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.

### **D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR GUNA YATRA**

#### **1 Transparency (Keterbukaan)**

BPR mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, strategi BPR, kondisi keuangan dan non keuangan BPR, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola serta informasi dan fakta material.

#### **2 Accountability**

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.  
BPR menetapkan check and balance system dalam pengelolaan Perusahaan.

#### **3 Responsibility**

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

#### **4 Independency**

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun

#### **5 Fairness**

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

### **E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA**

PT. BPR Guna Yatra telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT. BPR Guna Yatra menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PT. BPR Guna Yatra



## BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

### A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: JOESAAK LOEKSONO IR
	NIK	: 3570802305680007
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR, dan mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Peraturan Perundang-undangan 2. Menerapkan prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha BPR di seluruh jenjang organisasi 3. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan /atau otoritas lainnya 4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, manajemen resiko dan kepatuhan 5. Dalam rangka mendukung terselenggaranya Good Corporate Governance, Direksi wajib memastikan terpenuhinya SDM yang memadai dalam : a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan penunjang lainnya b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan independen terhadap unit kerja lain 6. Menyelenggarakan RUPS tahunan sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan Peraturan Perundang-undangan untuk memertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya terhadap Pemegang Saham 7. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai 8. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: MOCHAMMAD ZULKIFLI GHANI SE
	NIK	: 3578141110820001
	Jabatan	: 0200 - Direktur

	<p>Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR, dan mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>2. Menerapkan prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha BPR di seluruh jenjang organisasi</p> <p>3. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan /atau otoritas lainnya</p> <p>4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, manajemen resiko dan kepatuhan</p> <p>5. Dalam rangka mendukung terselenggaranya Good Corporate Governance, Direksi wajib memastikan terpenuhinya SDM yang memadai dalam :</p> <p>a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan penunjang lainnya</p> <p>b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan independen terhadap unit kerja lain</p> <p>6. Menyelenggarakan RUPS tahunan sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan Peraturan Perundang-undangan untuk memepertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya terhadap Pemegang Saham</p> <p>7. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai</p> <p>8. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris</p>
<b>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris</b>	
	<p>1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas</p> <p>2. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional</p> <p>3. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat</p> <p>4. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem</p>

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	<p>Nama : TJIA BENG HAP</p> <hr/> <p>NIK : 3578152609550002</p> <hr/> <p>Jabatan : Komisaris</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab</p>

		<p>secara independen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</li> <li>4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan OJK</li> <li>5. Memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelanggaran, peraturan perundang undangan dibidang keuangan dan perbankan</li> <li>b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR</li> </ol> </li> <li>6. Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar BPR dan Peraturan Perundang-undangan</li> </ol>
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: LAUW GUNAWAN LESMONO
	NIK	: 3578262803760002
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen</li> <li>2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</li> <li>4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan OJK</li> <li>5. Memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelanggaran, peraturan perundang undangan dibidang keuangan dan perbankan</li> <li>b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR</li> </ol> </li> <li>6. Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar BPR dan Peraturan Perundang-undangan</li> </ol>
Rekomendasi Kepada Direksi		
	1.	Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas

2. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
3. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat
4. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

#### b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-	-

#### c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -

## B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	JOESAAK LOEKSONO IR	3570802305680007	-	-
2	MOCHAMMAD ZULKIFLI GHANI SE	3578141110820001	-	-

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

## C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	JOESAAK LOEKSONO IR	3570802305680007	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	MOCHAMMAD ZULKIFLI GHANI SE	3578141110820001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	JOESAAK LOEKSONO IR	3570802305680007	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	MOCHAMMAD ZULKIFLI GHANI SE	3578141110820001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	TJIA BENG HAP	3578152609550002	-	-
2	LAUW GUNAWAN LESMONO	3578262803760002	1.800.000.000	20,00%

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	TJIA BENG HAP	3578152609550002	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	LAUW GUNAWAN LESMONO	3578262803760002	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	TJIA BENG HAP	3578152609550002	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	LAUW GUNAWAN LESMONO	3578262803760002	tidak ada	tidak ada	JIMMY KARDONO LAUW-Saudara Kandung

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	270.000.000	2	133.000.000
2	Tunjangan	2	12.000.000	2	0
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total			282.000.000		133.000.000

## 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	-	-
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	-
4	Fasilitas lainnya	-	-

## G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,58	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,25	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,67	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,16	1

## H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

### 1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2023-4-10	4	1. Pembahasan Realisasi Triwulan I 2023 2. Penyaluran Kredit lebih agresif 3. Penagihan terhadap debitur NPL 4. Penyaluran kredit P2P dilakukan lebih hati hati 5. Segera mempersiapkan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris 6. Follow Up temuan audit OJK
2	2023-7-12	4	1. Pembahasan Realisasi Triwulan II 2023 2. Penyaluran Kredit lebih agresif 3. Penagihan terhadap debitur NPL lebih intensif (mengirimkan surat peringatan) 4. Pemegang Saham diharapkan support likuiditas
3	2023-10-16	4	1. Pembahasan Realisasi Triwulan III 2023 2. Penyaluran Kredit lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian 3. Penagihan terhadap debitur NPL lebih intensif (mengirimkan surat peringatan) 4. Penyelesaian kredit bermasalah lebih optimal 5. Meningkatkan funding 6. Pemegang Saham diharapkan support likuiditas
4	2023-11-6	4	1. Pembahasan RBB tahun 2024 2. Penagihan terhadap debitur NPL lebih intensif (mengirimkan surat peringatan) 3. Penyelesaian kredit bermasalah lebih optimal 4. Meningkatkan funding

### 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	TJIA BENG HAP	3578152609550002	4	0	100,00%
2	LAUW GUNAWAN LESMONO	3578262803760002	4	0	100,00%

### I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

### J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

### K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-



## **M. PENUTUP**

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Guna Yatra ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Guna Yatra. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Guna Yatra ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Guna Yatra, Terima Kasih.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Guna Yatra ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Guna Yatra. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Guna Yatra ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Guna Yatra, Terima Kasih.

**SURABAYA, 24 Januari 2024**  
Persetujuan Pengurus PT. BPR Guna Yatra

  
**JOESAAK LOEKSONO IR**  
Direktur Utama



  
**MOHAMMAD ZULKIFLI GHANI SE**  
Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan